



Te



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul | Telp/Fax 0274-367310 | Email :
dinas.pupkp@bantulkab.go.id | Website : dpupkp.bantulkab.go.id

LAPORAN KINERJA (LKJ)
TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

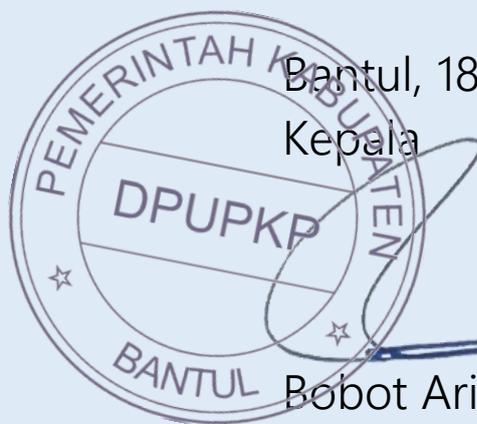
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2018.



Bantul, 18 Februari 2019

Kepala

Bobot Ariffi 'Aidin, ST., MT.

NIP. 19690619 1996 03 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa kontruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa kontruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan

bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima IKU, disimpulkan bahwa kelima indikator berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 104,29%. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik.
3. Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani.
4. Persentase kecukupan air irigasi.
5. Persentase penanganan banjir.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

	hlmn.
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	vii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel	xvii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM.....	7
E. Isu Strategis.....	10
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. Visi dan Misi.....	15
2. Tujuan dan Sasaran	19
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	21
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	27
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	32

Bab III Akuntabilitas Kinerja	33
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	36
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	39
1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	39
2. Sasaran 2: Meningkatnya kecukupan air irigasi.....	48
3. Sasaran 3: Meningkatnya penanganan banjir	64
4. Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	71
C. Akuntabilitas Anggaran.....	84
D. Efisiensi Sumber Daya.....	88
Bab IV. Penutup	91

Daftar Tabel

	hlmn.
Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan Tahun 2018	8
Tabel 2. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP.....	9
Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja	20
Tabel 4. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dan Akhir Renstra.....	21
Tabel 5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	23
Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	30
Tabel 8. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018.....	33
Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja	36

Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	38
Tabel 11.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik	40
Tabel 12.	Kondisi jalan Kabupaten Bantul per Desember 2018	42
Tabel 13.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kecukupan Air Irigasi.....	49
Tabel 14.	Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2011-2018	51
Tabel 15.	Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2018	52
Tabel 16.	Capaian Persentase Penanganan Banjir Tahun 2018	65
Tabel 17.	Target, Realisasi, dan Kinerja untuk Indikator Penanganan Banjir (%) Tahun 2015-2018.....	66
Tabel 18.	Capaian Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2018.....	72
Tabel 19.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018.....	85

Tabel 20.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	88
Tabel 21.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	90

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan

berisi :

- a. Latar Belakang*
- b. Pembentukan OPD*
- c. Susunan Organisasi*
- d. Keragaman SDM*
- e. Isu Strategis*

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)

Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPUPKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Perubahan Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

B. Pembentukan OPD

DPUPKP merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPUPKP menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa kontruksi;
2. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa kontruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa kontruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

C. Susunan Organisasi

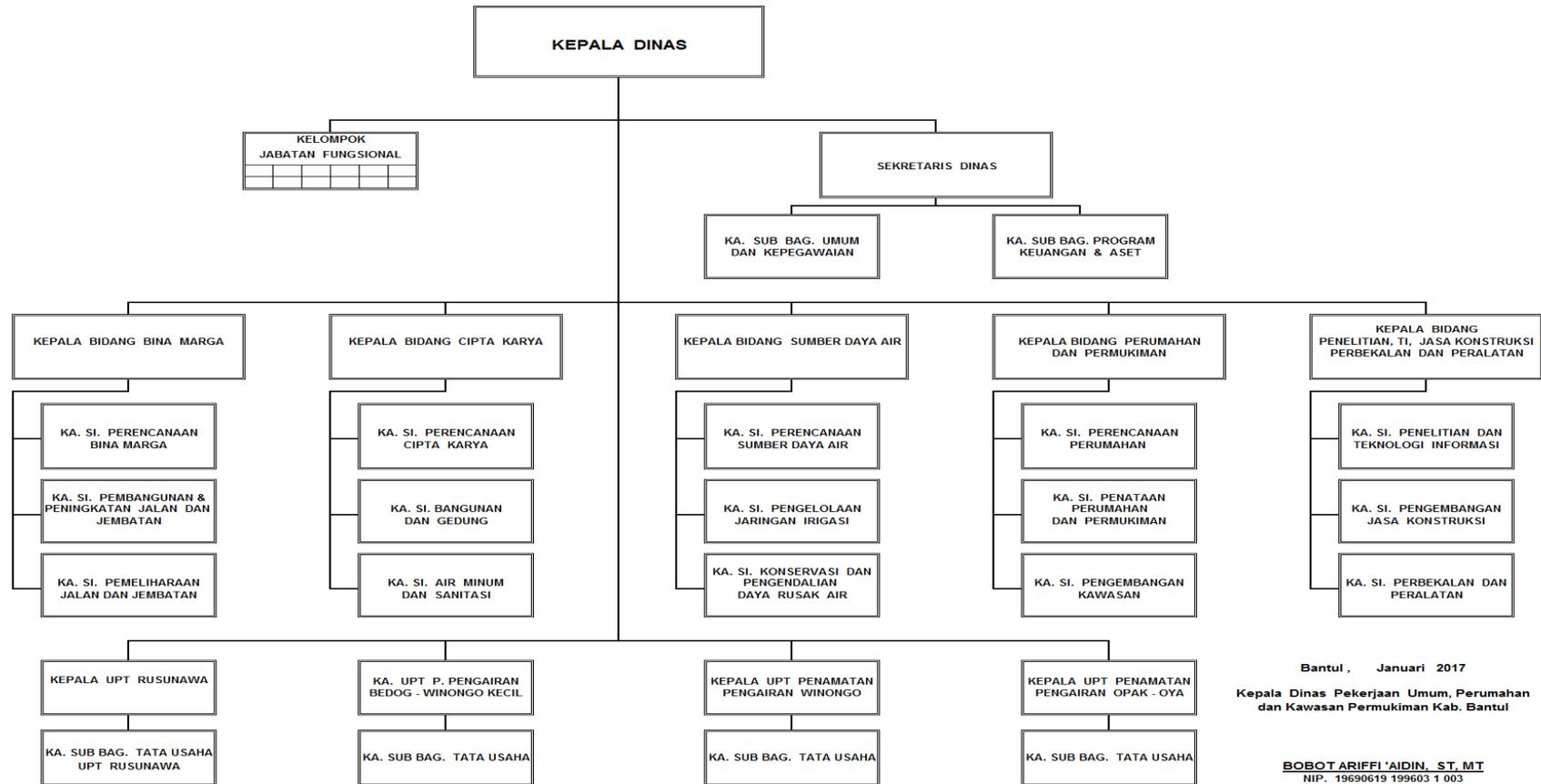
Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Sumber Daya Air;
6. Bidang Perumahan dan Permukiman;
7. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;

8. UPT; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas PUPKP dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
SESUAI PERDA KAB. BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016**



Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan survai lapangan, perencanaan DED, pengawasan pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan dokumen rencana, evaluasi dan laporan implementasi secara tepat dan cepat sesuai kurun waktunya. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 31 Desember 2018 ada 119 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan Tahun 2018

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki 2	Wanita a	I	II	III	IV	S D	SLT P	SLT A	DIII	S1	S2
119	109	10	6	48	53	12	6	11	64	3	21	14

Sumber: DPUPKP, 2018

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	0	0	0	1
Sekretariat	35	4	16	14	1
Bidang Bina Marga	15	1	4	9	1
Bidang Cipta Karya	7	0	2	3	2
Bidang Sumber Daya Air	12	0	5	3	4
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	0	2	4	2
Bidang Lit, TI, Jakon dan Alkal	14	0	4	9	1
UPT Pengamatan Pengairan BWK	6	0	4	2	0
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	6	1	3	2	0
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	11	0	7	4	0
UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	0	1	2	0
Arsiparis/JFT	1	0	0	1	0
	119	6	48	53	12

Sumber: DPUPKP, 2018

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPKP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PUPKP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan

dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

Isu Strategis Bidang Bina Marga

1. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
2. Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas jalan menuju/dari lokasi pengambilan galian C.
3. Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah terisolir, kawasan budaya, wisata serta sentra-sentra industri.

Isu Strategis Bidang Cipta Karya

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah.
2. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah sebagai bagian dari upaya merealisasikan *good governance*
3. Pengelolaan drainase lingkungan dengan memberdayakan masyarakat

Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

1. Peningkatan pelayanan kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan

2. Perlindungan kawasan permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sektor strategis lainnya dari ancaman banjir
3. Pengelolaan bahan galian golongan C, air baku melalui pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penggunaan air baku dan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Isu Strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman yang baik seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Beberapa permasalahan terkait urusan perumahan permukiman yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah:

1. Perlunya peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air

hujan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan ruang publik

2. Masih terdapat beberapa wilayah/kawasan yang masuk dalam kategori kumuh
3. Masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH).

Isu Strategis Bidang Penelitian Teknonolgi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan

1. Perlunya perangkat keras dan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyediaan data dan informasi secara komprehensif dan *up to date*
2. Peningkatan kualitas hasil pekerjaan konstruksi
3. Perlunya pengadaan alat-alat berat yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

a. Rencana Strategis

b. Perjanjian Kinerja

c. Program Untuk Pencapaian Sasaran

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dicanangkan, adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4: "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana".

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan layanan infrastruktur publik yang berkualitas dan memadai	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)
		Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi (%)
		Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir (%)
		Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase kawasan kumuh (%) perkotaan yang tertangani
	Mewujudkan penyediaan rumah dan kawasan permukiman yang layak huni kepada masyarakat		

Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2018 dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut.

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dan Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Satuan	Target Tahun 2018	Target Akhir 2021
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	74,58	76,08
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	82	84
2.	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi	%	81,66	83,16
3.	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir	%	27,34	47,68
4.	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	80	100

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan layanan infrastruktur publik yang berkualitas dan memadai	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Penyelenggaraan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten	Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan
		Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah
	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Melaksanakan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi, dan pembangunan bangunan pelengkap	Peningkatan pelayanan kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan
Meningkatnya penanganan banjir		Melakukan pengurangan resiko bencana melalui pemeliharaan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan sarana prasarana pengendali bencana	Perlindungan kawasan permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sektor strategis lainnya dari ancaman banjir

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan penyediaan rumah dan kawasan permukiman yang layak huni kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat	Penyelenggaraan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
6. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
7. Program pengelolaan areal pemakaman
8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
11. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
13. Program Pengendalian Banjir
14. Program Pembangunan Gedung

15. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
16. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
17. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan
infrastruktur perdesaan
18. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
2	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi
3	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir
4	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani

Sumber: DPUPKP 2018

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2018, IKU dan APBD Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun
2018 sebagai berikut :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul, Kabupaten Bantul 55713
Telepon (0274) 367310 Fax. (0274) 367310
Website : <http://www.pupkp.bantulkab.go.id>, e-mail : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. SUHARSONO
Jabatan : Bupati Bantul

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

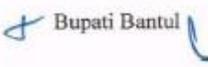
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua
Bupati Bantul

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul



Drs. H. SUHARSONO



BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST, MT
NTP. 10000610 100607 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen Persen	84,95 82
2	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	Persen	80
3	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi	Persen	83
4	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir	Persen	27,34

Program	Anggaran	Keterangan
1) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 40.298.453.000	APBD
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 9.012.225.000	APBD
3) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Rp 8.604.275.000	APBD
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp 380.000.000	APBD
5) Program Pembangunan Gedung	Rp 10.438.000.000	APBD
6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 1.189.851.000	APBD
7) Program Pengembangan Perumahan	Rp 3.264.930.000	APBD
8) Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 732.825.000	APBD
9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 20.516.909.080	APBD
10) Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp 723.650.000	APBD
11) Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Rp 22.994.996.440	APBD
12) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp 21.334.520.000	APBD
13) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp 701.691.000	APBD
14) Program Penyediaan dan Pengelolaan	Rp 70.000.000	APBD
15) Program Pengendalian Banjir	Rp 7.770.097.000	APBD
Jumlah	Rp 148.032.422.520	

Bupati Bantul

Drs. H. SUHARSONO

Bantul, Januari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST, MT
NIP. 19690619 199603 1 001

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 8. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan 4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5. Pengembangan Jasa Konstruksi 6. Program Pembangunan Gedung
2.	Meningkatnya kecukupan air irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 2. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 3. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 4. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 5. Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan drainase/gorong-gorong
3.	Meningkatnya penanganan banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengendalian banjir
4.	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan perumahan 2. Program pengelolaan areal pemakaman 3. Program lingkungan sehat perumahan

Sumber: DPUPKP, 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama*
- b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- c. Akuntabilitas Anggaran*
- d. Efisiensi Sumberdaya*

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja

organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	74,18	74,58	74,58	100	76,08	98,03
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	80,00	82	84	102,44	84	100
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	81,16	81,66	80,44	98,51	83,16	96,73
4	Persentase penanganan banjir (%)	24,90	27,34	28,84	105,49	47,68	60,49
5	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	79,69	80	92,06	115,08	100	92,06

Sumber : DPUPKP, 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2018,

disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 104,29%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Terdapat dua indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan sasaran ini yaitu persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik seperti pada tabel di bawah.

Tabel 11. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	74,18	74,58	74,58	100	76,08	98,03
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	80,00	82	84	102,44	84	100

Sumber : DPUPKP 2018

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 74,58%, realisasi sebesar 74,58%, tercapai 99,96% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 74,18% maka capaian tahun 2018 naik sebesar 0,54%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 76,08%. Capaian tahun 2018 ini telah

menyumbangkan 98,03% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2018 sepanjang 465,73km atau 74,58% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 158,74km atau 25,42% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km. Sedangkan kondisi jalan perdesaaan sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Pada tahun 2018 terealisasi 22,25km dari jalan desa di Kabupaten Bantul sepanjang 164,64km.

Tabel 12. Kondisi jalan Kabupaten Bantul per Desember 2018

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Aspal	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk menangani jembatan yang rusak dengan indikator program jumlah jembatan tertangani. Target pada RPJMD sebanyak

10 unit jembatan, dapat dicapai 11 unit jembatan tertangani yaitu :

- a. Jembatan Sudimoro (Triwidadi)
- b. Jembatan Pedak
- c. Jembatan Jragan
- d. Jembatan Arah Ganjuran
- e. Jembatan Ganjuran – Patalan
- f. Jembatan Banjardadap – Sanggrahan
- g. Jembatan Kowen
- h. Jembatan Payak
- i. Jembatan Kajor Kulon
- j. Jembatan Sungapan
- k. Penanganan Jembatan Kasihan melalui pemasangan Jembatan Bailey

2. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan agar fungsi jalan menjadi optimal. Indikator kinerja program ini adalah penanganan jalan kabupaten dengan indikator program panjang jalan kabupaten tertangani. Target tahun 2018 sepanjang 15 km, tertangani 22,67 km atau 151%. Program ini didukung kegiatan:

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan keluaran berupa pemeliharaan rutin jalan kabupaten sebanyak 41 ruas
- b. Peningkatan jalan kabupaten sebanyak 35 ruas

3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Indikator kinerja program ini adalah tertanganinya drainase jalan kabupaten, dengan formulasi panjang drainase terangan dengan target 400m. Capaian pada tahun 2018 berhasil tertangan 425m atau 106%.

Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 82%, realisasi sebesar 84%, tercapai 102,44% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 80%, maka capaian tahun 2018 mengalami peningkatan. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 84%. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021. Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Pembangunan Gedung. Dari 50 (lima puluh) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator terdapat 8 (delapan) gedung dengan kondisi sedang dan 42 (empat puluh dua) atau 84% gedung kantor dengan kondisi baik. Program ini didukung dengan kegiatan Pembangunan Gedung dengan keluaran:

- a. Pemb/Rehab. DPUPKP Kab. Bantul
- b. Rehab. Kantor Kecamatan Banguntapan
- c. Rehab. Kantor Kecamatan Pleret

- d. Pemb. Gedung Kecamatan Sanden
- e. Pemb. Pendopo Komplek 2 Perkantoran
Pemkab Bantul
- f. Rehab. Kantor Kecamatan Kasihan
- g. Pemb. Panggung Terbuka Depan Pasar Bantul
- h. Pembangunan Pos Jaga Perkantoran Baru
- i. Pembangunan Kanopi Penghubung (Doorloop)
Parasamyra
- j. Rehab Gapura Batas Kota
- k. Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati
- l. Rehab Atap Eks Dikmenof
- m. Pembangunan Pos Polisi Klodran
- n. Rehab Ruang Sekretaris dan Bina Marga
DPUPKP

Dengan terjaganya kondisi gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.

2. Sasaran 2: Meningkatnya kecukupan air irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman. Indikator kinerja sasaran ini adalah:

Persentase kecukupan air irigasi

Kinerja dari indikator ini untuk mengukur luas daerah irigasi yang dapat terairi dengan baik dibagi jumlah luas daerah irigasi x 100%. Capaian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 13. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kecukupan Air Irigasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kecukupan air irigasi (%)	81,16%	81,66	80,44	98,51	83,16	96,73

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 81,66%, realisasi sebesar 80,44%, tercapai 98,51% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 81,16% maka capaian tahun 2018

turun sebesar 0,88%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 83,16%. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 96,73% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Target kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 81,66% (7.050,52Ha) dan terealisasi sebesar 80,44% (6.945,19Ha) atau tercapai sebesar 98,51%. Data target dan capaian DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2011-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 14. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2011-2018

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2011	5.380,44	78,00	5.656,36	82,00
2012	5.656,36	82,00	5.794,32	84,00
2013	5.794,32	84,00	6.002,64	87,02
2014	7.425,24	86,00	7.552,16	87,47
2015	7.511,58	87,00	7.565,97	87,63
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44

Sumber: DPUPKP, 2018

Capaian ini merupakan kinerja dari program:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Capaian indikator kinerja program ini adalah kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2018 (DI kewenangan Kabupaten Bantul) adalah 80,5% (189.247,65m) dan terealisasi 81%

(190.422,09m) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,62%. Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2011-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 15. Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2018

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik)			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2011	335.232,24	81,50	341.402,17	83,00
2012	339.345,52	82,50	353.550,97	85,95
2013	353.741,99	86,00	365.460,06	88,38
2014	181.523,40	87,00	184.632,25	88,49
2015	183.521,40	88,00	186.754,37	89,55
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00

Sumber: DPUPKP, 2018

Program ini didukung oleh kegiatan:

- a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya meliputi:
 - 1) DED Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paket I
 - 2) DED Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paket II
 - 3) DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paket I
 - 4) DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paket II
 - 5) DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan Afvour Pkt I
 - 6) DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan Afvour Paket II
 - 7) DED Pembangunan/Rehabilitasi Bendung

- 8) DED Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jaringan Irigasi
- 9) DED Pembangunan/Rehabilitasi Bantaran Tanggul
- 10) DED Restorasi Sungai
- 11) DED Sumur Dalam Mangunan 2 Titik
- 12) Penyusunan One Map IGT Daerah Irigasi UPT BWK
- 13) Penyusunan One Map IGT Daerah Irigasi UPT Winongo
- 14) Penyusunan One Map IGT Daerah Irigasi UPT Opak Oyo
- 15) Penyusunan Indeks Kinerja Jaringan Irigasi UPT BWK
- 16) Penyusunan Indeks Kinerja Jaringan Irigasi UPT Winongo
- 17) Penyusunan Indeks Kinerja Jaringan Irigasi UPT Opak Oyo

b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) pemeliharaan Jaringan irigasi pengamatan BWK
- 2) pemeliharaan Jaringan irigasi pengamatan Opak Hulu/Winongo
- 3) pemeliharaan Jaringan irigasi pengamatan Opak Hilir
- 4) Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DI Mejing, DI Karangploso, DI Sorowajan)
- 5) Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DI Widodo, DI Mojo, DI Timbulsari)
- 6) Rehabilitasi Saluran Penguras dan Pembuang Irigasi

- 7) Rehabilitasi Rumah Jaga Bendung dan Rumah Pompa
- 8) Rehabilitasi ringan bendung, rumah pelindung, rumah jaga bendung dan papan operasi Daerah Irigasi
- 9) Pemeliharaan Jaringan Sekunder Pleret Karangploso Pleret
- 10) Rehabilitasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Bangunan Ukur dan Pielschale
- 11) Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air (UPT BK, Winongo, Opak Hulu, Opak Oyo)
- 12) Peningkatan/Rehabilitasi DI Pacar 1
- 13) Peningkatan/Rehabilitasi DI Beji
- 14) Peningkatan/Rehabilitasi DI Kadisono
- 15) Peningkatan/Rehabilitasi DI Ewon
- 16) Peningkatan/Rehabilitasi DI Mejing

- 17) Peningkatan/Rehabilitasi DI Jotawang
- 18) Peningkatan/Rehabilitasi DI Kadibeso
- 19) Peningkatan/Rehabilitasi DI Tintang
- 20) Peningkatan/Rehabilitasi DI Grojogan
- 21) Peningkatan/Rehabilitasi DI Salakan
- 22) Peningkatan/Rehabilitasi DI Gempolan
- 23) Peningkatan/Rehabilitasi DI Tegal
Tamanan
- 24) Peningkatan/Rehabilitasi DI
Malangjiwan
- 25) Peningkatan/Rehabilitasi DI Peni
Palbapang
- 26) Peningkatan/Rehabilitasi DI Kadisono
Kiri
- 27) Peningkatan/Rehabilitasi DI Gunung
Tambalan
- 28) Peningkatan/Rehabilitasi DI Bebekan

- | | | | |
|-----|--|----|--------|
| 29) | Peningkatan/Rehabilitasi
Kembanggede Pajangan | | DI |
| 30) | Peningkatan/Rehabilitasi
Gerjen RT 06 Kauman Pleret | DI | Dusun |
| 31) | Peningkatan/Rehabilitasi
Kidul Tamanan Banguntapan | DI | Glagah |
| 32) | Peningkatan/Rehabilitasi
Singosaren Banguntapan | DI | Karang |
| 33) | Peningkatan/Rehabilitasi
SMP 1 Piyungan | DI | Depan |
| 34) | Peningkatan/Rehabilitasi
Karangtalun Imogiri | DI | Kruduk |
| 35) | Peningkatan/Rehabilitasi
Kanan (bencal) | DI | Canden |
| 36) | Peningkatan/Rehabilitasi
Semerangan (bencal) | | DI |
| 37) | Peningkatan/Rehabilitasi
(bencal) | DI | Tegal |

- 38) Perbaikan Talang DI Karangasem
Srimulyo (bencal)
- 39) Peningkatan/Rehabilitasi DI Dagan
Timbulharjo Sewon
- 40) Peningkatan/Rehabilitasi DI Kweden
Bantul
- 41) Peningkatan/Rehabilitasi DI Sindet
- 42) Peningkatan/Rehabilitasi DI Pranti
- 43) Peningkatan/Rehabilitasi DI
Mergoyoso
- 44) Peningkatan/Rehabilitasi Irigasi Dusun
Turi Sidomulyo Bambanglipuro
- 45) Peningkatan/Rehabilitasi DI Tegal Kiri
- 46) Peningkatan Rehabilitasi DI Widodo
- 47) Peningkatan Rehabilitasi DI Dokaran
- 48) Peningkatan Rehabilitasi DI Kajor
- 49) Peningkatan Rehabilitasi DI Pranti I

- 50) Peningkatan Rehabilitasi DI Karangasem
- 51) Peningkatan Rehabilitasi DI Terong
- 52) Peningkatan Rehabilitasi DI Kembang
- 53) Peningkatan Rehabilitasi DI Sikluweh
- 54) Peningkatan Rehabilitasi DI Siraman
- 55) Peningkatan Rehabilitasi DI Pancuran

c. Pengelolaan Jaringan Irigasi untuk:

- 1) Pemeliharaan saluran irigasi pada 5 daerah irigasi (DI) yaitu :
 - a) Rehabilitasi DI Mejing 485 ha
 - b) Rehabilitasi DI Tengah 163 ha
 - c) Rehabilitasi DI Kenalan 721 ha
 - d) Rehabilitasi DI Tegal 601 ha
 - e) Rehabilitasi DI Klegen 186 ha
- 2) Perencanaan Desain Partisipatif

- a) Pengadaan Desain Partisipatif
UPT Opak Oyo
- b) Pengadaan Desain Partisipatif
UPT BWK dan UPT Winongo
- 3) Kajian Pengelolaan Aset Irigasi
 - a) UPT Winongo (DI Kemiri dan DI
Balong)
 - b) UPT Opak Oyo (DI Canden dan
DI Jotawang)
 - c) UPT BWK (DI Widodo dan DI
Kadisono
- d. Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
untuk Pembangunan Dam Pacar Kanan.
- e. Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
untuk pemeliharaan jaringan irigasi pada 3
UPT yaitu UPT Winongo, UPT Opak Oyo dan
UPT BWK.

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini bertujuan untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan air baku dengan anggaran Rp.61.475.500,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah pemeliharaan 1 unit sumur bor.

- a. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
- b. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber air dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya dengan output kegiatan berupa

pembangunan embung Kunden Sendangsari Pajangan, Embung Sabrang Lor Triwidadi Pajangan, Embung Dung Biru Seloharjo Pundong dan Embung Pancuran Terong Dlingo.

- 2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan output kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan rambu larangan sebanyak 31 unit dan kegiatan sosialisasi pemanfaatan sumber daya air dengan jumlah peserta sebanyak 1.400 orang.

3. Sasaran 3: Meningkatnya penanganan banjir

Persentase penanganan banjir

Topografi Kabupaten Bantul dengan bentukan alamnya secara alami menciptakan kawasan potensi banjir genangan maupun banjir luapan. Adanya aktifitas manusia yang mengubah alam mempunyai efek samping antara lain menghambat fungsi drainase sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Untuk mengetahui capaian untuk sasaran ini melalui indikator yaitu seberapa besar pengurangan luas potensi banjir. Apabila potensi luasan banjir makin berkurang maka mengindikasikan tercapainya sasaran ini. Capaian penanganan banjir tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 16. Capaian Persentase Penanganan Banjir Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penanganan banjir	24,90	27,34	28,84	105,49	47,68	60,49

Capaian indikator kinerja persentase penanganan banjir adalah 28,84% (257,70Ha) dari target 27,34% (244,30Ha) atau tercapai 105,49% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 24,90% maka capaian tahun 2018 naik 15,82%. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 47,68% maka capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 60,49% dari target akhir Renstra tahun 2021. Realisasi capaian indikator penanganan banjir tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 17. Target, Realisasi, dan Kinerja untuk Indikator Penanganan Banjir (%) Tahun 2015-2018

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2015	13,52	120,80	13,52	120,80	100
2	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
3	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
4	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49

Ket.: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari program:

1. Program Pengendalian Banjir

Program pengendalian banjir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan lokasi penanganan banjir baik dari sungai maupun afvour akibat curah hujan yang tinggi. Dari 18 lokasi

yang menjadi target kinerja tahun 2018 terealisasi 19 lokasi penanganan banjir atau 105,5% dari target. Program ini didukung dengan kegiatan:

- a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai dengan keluaran:
 - 1) Perkuatan tebing sungai sebanyak 18 paket yang terdiri dari:
 - a) Perkuatan Tebing Sungai Winongo Lama
 - b) Perkuatan Tebing Sungai Bulus
 - c) Perkuatan Tebing Sungai Widuri
 - d) Perkuatan Tebing Sungai Konteng
 - e) Perkuatan Tebing Sungai Konteng Argorejo Sedayu

- f) Perkuatan Tebing Kembanggede Guwosari Pajangan
- g) Perkuatan Tebing di Nitiprayan
- h) Perkuatan Tebing Sungai Gawe
- i) Perkuatan Tebing Sungai Celeng (Girirejo)
- j) Perkuatan Tebing Sungai Belik
- k) Perkuatan Tebing Kali Pesing
- l) Perkuatan Tebing Sungai Pesing Kedungpring RT 01 Pleret
- m) Perkuatan Tebing Sungai Karangturi RT 07 Baturetno
- n) Perkuatan Tebing Kali Mati Krinjing Imogiri
- o) Perkuatan Tebing Sungai Kalangan RT 05 Banguntapan

- p) Perkuatan Tebing Sungai di Sumber Batikan Bantul
 - q) Perkuatan Tebing Sungai Kweden Tirenggo Bantul
 - r) Perkuatan Tebing Sungai Celeng (Wukirsari)
- 2) Peningkatan afvour sebanyak 19 paket pada lokasi:
- a) Peningkatan Afvour Blado
 - b) Peningkatan Afvour Monggang
 - c) Peningkatan Afvour Bakung
 - d) Peningkatan Afvour Mriyan
 - e) Peningkatan Afvour Depok
 - f) Peningkatan Afvour Sital
 - g) Peningkatan Afvour Bajang
 - h) Peningkatan Afvour Gumuk
 - i) Peningkatan Afvour Gulon
 - j) Peningkatan Afvour Ngetuk

- k) Afvour Tangkil Pundong
- l) Afvour Bobok Tempel
- m) Afvour Karangasem Seloharjo
Pundong
- n) Afvour Nglorong Panjangrejo
Pundong
- o) Afvour Dempet Srihardono
Pundong
- p) Afvour Mintoragan Potorono
Banguntapan
- q) Afvour Purworejo RT 03
Wonoleleo Pleret
- r) Afvour Somokaton
- s) Afvour Krekah Pandak

4. Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat

Persentase kawasan kumuh Perkotaan yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2018 adalah 92,06% dari target akhir RPJMD yaitu 80%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Tabel 18. Capaian Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	79,69	80	92,06	115,08	100	92,06

Capaian indikator kinerja persentase Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani adalah 92,06% dari target 80% atau tercapai 115,08% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 79,69% maka capaian tahun 2018 naik 15,52%. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 92,06% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

1. Program Pengembangan Perumahan

Indikator kinerja program ini adalah Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Dari 46% target yang ditetapkan pada tahun 2018 tercapai 64,79% atau 141% dari target atau 2.624 unit dari jumlah RTLH 5.703 unit. Kegiatan pendukung dan keluaran pada program ini adalah:

- a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan dengan keluaran berupa Dokumen Pemetaan Perumahan Wilayah Timur, Tengah dan Barat, Dokumen Feasibilitas Rusunawa Piyungan dan Dokumen Pemetaan Kawasan Kumuh
- b. Penyelenggaraan pengembangan perumahan berupa pendampingan kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan sumber dana BSPS (Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 959 KK.

- c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan output berupa penyaluran dan pendampingan penanganan RTLH sumber dana DAK sebanyak 150 unit dan sumber dana APBD Kabupaten Bantul sebanyak 172 unit serta kegiatan pendataan rumah di Kabupaten Bantul
- d. Operasional empat unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan;
- e. Pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggungharjo dan Tamanan.

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh dengan output berupa Dokumen Pemetaan Infrastruktur Perdesaan Wilayah Timur, Tengah dan Barat.

3. Pengelolaan Areal Pemakaman

Pesatnya pembangunan perumahan tidak sebanding dengan ketersediaan pemakaman umum. Hal ini memicu terjadinya permasalahan konflik sosial antara warga perumahan dengan masyarakat sekitar. Program ini dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bertujuan untuk menyediakan areal pemakaman umum di Kecamatan Imogiri. Penyediaan pemakaman umum merupakan salah satu solusi untuk mengatasi

permasalahan pemakaman khususnya bagi masyarakat yang tinggal di perumahan.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan drainase sehingga dapat menanggulangi kerawanan air, pencemaran lingkungan dan genangan air hujan. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan pengembangan IPAL Komunal. Dan sampai dengan tahun 2018 telah terbangun IPAL Komunal dari APBD sebanyak 35 unit atau 88% dari target sebanyak 40 unit. Program ini didukung dengan kegiatan:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah meliputi:

- 1) Pembangunan SR IPAL Terpusat di 3 kecamatan yaitu Banguntapan, Sewon dan Kasihan.
 - 2) Pembangunan saluran drainase/air hujan di 36 lokasi tersebar di Kabupaten Bantul.
- b. Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah dengan keluaran berupa perencanaan teknis pembangunan sarana prasarana air minum dan air limbah serta dokumen lingkungan Kompleks Parasamya.
- c. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dengan keluaran meliputi:

- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM):
 - a) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Gilangharjo Pandak (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan);
 - b) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Argosari Sedayu (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan);
 - c) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Triwidadi (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan);

- d) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Ngestiharjo (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan);
 - e) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Bantul (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan
 - f) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Temuwuh (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan
 - g) SPAM Bangunharjo Sewon;
- 2) Empat SRM di Jetis, Kasihan, Pajangan dan Bantul

- 3) Pengadaan SR Air Minum sebanyak 4 lokasi yaitu di Srimulyo Piyungan, Bawuran Pleret, Sriharjo Imogiri dan Triwidadi Pajangan.

5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Indikator kinerja program ini adalah persentase penanganan infrastruktur perdesaan dengan indicator program Persentase penanganan infrastruktur perdesaan yang diukur dengan formulasi panjang jalan desa yang ditangani dibagi total panjang jalan desa dikalikan seratus persen. Capaian tahun 2018 ini 22,25 km dari panjang jalan desa 149,83km (14,85%) atau 102% dari target 14,63%.

Program ini didukung dengan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyediakan

sarana prasarana aksesibilitas wilayah dan fasilitas perdagangan di wilayah perdesaan dengan keluaran yaitu pembangunan jalan dan jembatan perdesaan berupa pembangunan jalan desa sebanyak 48 ruas sepanjang 22,250 km dan pembangunan jembatan Ponggok Trimulyo Jetis.

Permasalahan :

Dari empat sasaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul secara umum berkaitan dengan fisik konstruksi, sehingga permasalahan yang timbul hampir sama. Antara lain:

1. Banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten bukan kelasnya, sehingga mengurangi umur konstruksi jalan kabupaten terutama di jalur jalur penambangan galian C.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang telah terbangun

3. Pembangunan infrastruktur oleh pihak ketiga perlu didukung oleh tenaga terampil yang bersertifikat.
4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga tidak bisa menjangkau seluruh kerusakan yang ada

Solusi

Dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, dilaksanakan berbagai upaya antara lain :

1. Prioritas pembangunan infrastruktur untuk penanganan dampak banjir tahun 2017 dan mengusulkan kepada pemerintah propinsi/pusat untuk penanganan dampak banjir sesuai dengan kewenangannya.
2. Peningkatan struktur jalan pada jalur yang dilalui angkutan penambangan galian C.

3. Sosialisasi pada masyarakat untuk ikut menjaga kondisi infrastruktur yang ada
4. Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi
5. Koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya:

1. Menjaring aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang dibutuhkan.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada secara berkala dan berkesinambungan.
3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.
4. Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana peningkatan infrastruktur.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp.163.89.526.220,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.152.636.459.686 atau sebesar 93,13%. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	76.592.716.000	48,55
2	Meningkatnya kecukupan air irigasi	23.529.211.000	14,92
3	Meningkatnya penanganan banjir	9.247.722.000	5,82
4	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	48.379.901.500	30,67
Jumlah		157.749.550.500	96,25
Belanja Langsung Pendukung		6.143.975.720	3,75
Total Belanja Langsung		163.893.526.220	100

Sumber : DPUPKP, 2018

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.157.749.550.500,00 atau sebesar 96,25% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp6.143.975.720,00 atau sebesar 3,75% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik dengan besaran anggaran 48,55% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya penanganan banjir sebesar 5,82% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 93,13% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,25%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,75%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik sebesar

97,8%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 93,33%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya penanganan banjir menyerap anggaran paling besar yaitu 97,04% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 92,58% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	74,58	74,58	100	64.701.315.000	60.388.270.160	93,33
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	82	84	102,44	11.891.401.000	11.629.866.300	97,80
3	Persentase kecukupan air irigasi	81,66	80,44	98,51	23.529.211.000	22.653.323.604	96,28
4	Persentase penanganan banjir	27,34	28,84	105,49	9.247.722.000	8.973.971.000	97,04
5	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	80	92,06	115,08	48.379.901.500	44.790.575.504	92,58

Sumber : DPUPKP, 2018

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 6,86%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang

telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 5,9%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 31,63%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 6,66%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase kecukupan air irigasi sebesar 2,96%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 7,41% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya penanganan banjir, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 2,96% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	64.701.315.000	60.388.270.160	4.313.044.840	6,66
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	11.891.401.000	11.629.866.300	261.534.700	2,19
3	Persentase kecukupan air irigasi	23.529.211.000	22.653.323.604	875.887.396	3,72
4	Persentase penanganan banjir	9.247.722.000	8.973.971.000	273.751.000	2,96
5	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	48.379.901.500	44.790.575.504	3.589.325.996	7,41
Jumlah		157.749.550.500	148.436.006.568	9.313.543.932	5,90
Belanja Langsung Pendukung		6.143.975.720	4.200.453.118	1.943.522.602	31,63
Total Belanja langsung		163.893.526.220	152.636.459.686	11.257.066.534	6,87

Sumber : DPUPKP, 2018

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak empat sasaran, lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104,29% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui

semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Banjar

THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

